



Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Sarana Prasarana di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Amat Solleh

Universitas Terbuka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: amatsolleh7@gmail.com

Abstract. Mawang Village occupies a strategic position as a buffer zone integrating the administrative center of Gowa Regency with other growth centers, featuring the ecological asset of Lake Mawang, which holds significant potential for ecotourism development. However, a discrepancy exists between spatial planning policies and the actual development of facilities and infrastructure on the ground. This study aims to identify the availability, accessibility, and physical feasibility of regional facilities and infrastructure as a fundamental database for area development. The method employed is descriptive-quantitative with a comparative analysis approach referring to the SNI 03-1733-2004 standards and spatial analysis. The findings indicate that religious and commercial/service facilities exhibit very high service levels with surplus conditions, while basic health facilities and early childhood education remain below minimum service standards. Spatially, the distribution of facilities tends to be concentrated along the main corridor, creating accessibility disparities for residents in inner residential areas. The collector road infrastructure is functionally adequate but lacks pedestrian facilities, while local roads suffer from pavement quality degradation. Furthermore, Lake Mawang, as a primary tourist attraction, still lacks basic supporting facilities. The implications of this research emphasize the need for equitable distribution of health facilities, revitalization of road quality, and the formulation of a comprehensive spatial detail plan for the lake area to achieve sustainable regional development based on local potential.

Keywords: Accessibility; Ecotourism; Lake Mawang; Level of Service; Public Facilities.

Abstrak. Kelurahan Mawang memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga yang mengintegrasikan pusat pemerintahan Kabupaten Gowa dengan pusat pertumbuhan lainnya, serta memiliki aset ekologis Danau Mawang yang berpotensi menjadi destinasi ekowisata. Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dengan realitas pembangunan sarana dan prasarana di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan, keterjangkauan, serta kelayakan fisik sarana dan prasarana wilayah sebagai basis data pengembangan kawasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis komparatif merujuk pada standar SNI 03-1733-2004 serta analisis keruangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sarana peribadatan dan perdagangan/jasa memiliki tingkat pelayanan yang sangat tinggi dengan kondisi surplus, sementara sarana kesehatan dasar dan pendidikan anak usia dini masih berada di bawah standar pelayanan minimum. Secara spasial, distribusi fasilitas cenderung terkonsentrasi di sepanjang jalan poros utama sehingga menciptakan disparitas akses bagi penduduk di area permukiman yang lebih dalam. Kondisi prasarana jalan kolektor memadai secara fungsional namun belum dilengkapi fasilitas pejalan kaki, sedangkan jalan lokal mengalami degradasi kualitas perkerasan. Selain itu, Danau Mawang sebagai pusat daya tarik wisata masih kekurangan fasilitas pendukung dasar. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya pemerataan distribusi fasilitas kesehatan, revitalisasi kualitas jalan, serta penyusunan rencana detail tata ruang yang komprehensif pada kawasan danau guna mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Kata kunci: Aksesibilitas; Danau Mawang; Ekowisata; Fasilitas Umum; Tingkat Pelayanan.

1. LATAR BELAKANG

Kelurahan merupakan unit administratif terkecil yang memegang peranan krusial dalam implementasi kebijakan pembangunan lokal. Sebagai representasi pemerintah di tingkat akar rumput, kelurahan berfungsi sebagai jembatan birokrasi sekaligus garda terdepan dalam pelayanan publik, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan potensi wilayah. Salah satu wilayah yang memiliki signifikansi strategis adalah Kelurahan Mawang, Kecamatan

Somba Opu, Kabupaten Gowa. Lokasinya yang berada di kawasan penyangga (*buffer zone*) antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar memberikan keunggulan komparatif bagi perkembangan aspek sosial, ekonomi, maupun tata ruang wilayah tersebut.

Salah satu aset lingkungan yang menjadi karakteristik utama Kelurahan Mawang adalah keberadaan Danau Mawang. Secara ekologis, danau ini berfungsi sebagai kawasan resapan air dan habitat biota lokal, sementara secara sosiogeografis, Danau Mawang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata berbasis perairan darat tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi kerakyatan melalui sektor jasa wisata, namun juga menjadi instrumen edukasi dan pelestarian lingkungan melalui prinsip keberlanjutan.

Urgensi pengembangan Danau Mawang telah diakomodasi dalam berbagai dokumen kebijakan daerah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032, Danau Mawang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan fungsi utama menjaga daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025, yang menempatkan rehabilitasi dan pengembangan kawasan Danau Mawang sebagai program prioritas sektor pariwisata.

Namun, terdapat diskrepansi antara landasan regulasi dengan realitas di lapangan. Hingga saat ini, pemanfaatan potensi Danau Mawang belum optimal dan cenderung belum selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kendala utama yang sering dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata adalah keterbatasan dukungan fisik wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan serta kelayakan sarana dan prasarana sebagai basis data fundamental dalam perumusan strategi perencanaan pengembangan ekowisata Danau Mawang yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Aspek Sarana dan prasarana wilayah merupakan dua komponen fundamental yang saling terintegrasi dalam mendukung produktivitas serta fungsionalitas suatu kawasan. Sarana didefinisikan sebagai instrumen fisik maupun finansial yang berfungsi sebagai katalisator dalam mempermudah pencapaian tujuan suatu kegiatan (Kurnia et al., 2019). Sebagai sumber daya pendukung dalam penataan ruang, sarana tidak hanya berperan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan aktivitas wilayah, tetapi juga menjadi parameter utama dalam mengukur kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan (Dian & Wahyudi, 2020). Fasilitas ini secara fungsional mencakup infrastruktur sosial esensial seperti

sektor pendidikan, kesehatan, dan peribadatan (Tallo et al., 2021). Di sisi lain, prasarana merupakan fondasi fisik atau penunjang utama yang menjamin terselenggaranya proses pembangunan secara sistemik (KBBI, 2008). Jika sarana menitikberatkan pada fasilitas pelayanan aktivitas, maka prasarana lebih menekankan pada penyediaan kelengkapan fisik dasar lingkungan—seperti jaringan jalan, sistem drainase, serta distribusi air bersih—agar suatu kawasan fungsional dapat beroperasi secara optimal sesuai standar teknis (SNI 03-1733-2004; Rumagit et al., 2021; Marzaman et al., 2023).

Dalam mengukur kinerja pelayanan infrastruktur, konsep *Level of Service* (LoS) digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kapasitas ketersediaan fasilitas mampu mengakomodasi kebutuhan populasi tertentu (Sujarto, 2018). Penentuan ambang batas pelayanan ini merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan secara nasional untuk menjamin keadilan akses bagi seluruh warga (Ramdani & Mulyana, 2022). Perhitungan LoS dilakukan dengan mengomparasikan rasio ketersediaan sarana eksisting terhadap standar jumlah penduduk pendukung yang disyaratkan dalam regulasi teknis (Badan Standarisasi Nasional, 2004). Nilai LoS yang melampaui angka 100% mengindikasikan kondisi surplus, sementara nilai di bawah angka tersebut menunjukkan adanya defisit atau ketidaktercukupan pelayanan (Hariyanto, 2019; Saputra & Wijaya, 2020).

Selain aspek kuantitas, efektivitas pelayanan wilayah sangat dipengaruhi oleh variabel aksesibilitas, yang didefinisikan sebagai derajat kemudahan bagi penduduk untuk menjangkau suatu pusat pelayanan (Tamin, 2018). Aksesibilitas dalam perencanaan ruang diukur melalui standar radius pelayanan, yakni jarak tempuh maksimum yang dapat ditoleransi oleh masyarakat untuk menjangkau fasilitas publik (Irawan et al., 2021). Pola distribusi sarana, baik yang bersifat linier mengikuti jaringan jalan maupun tersebar secara merata, secara signifikan akan memengaruhi efisiensi pergerakan masyarakat (Afriandi, 2022; Zahra & Prasetyo, 2023). Dalam konteks pengembangan wilayah berbasis potensi alam, integrasi antara ketersediaan sarana dan prasarana yang tangguh merupakan syarat mutlak dalam mendukung daya tarik ekowisata (Gunn & Var, 2020). Keberadaan fasilitas penunjang yang memadai seperti sarana kesehatan dan aksesibilitas jalan yang baik merupakan komponen *amenity* utama yang mampu meningkatkan nilai kompetitif destinasi wisata sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan (Cooper et al., 2018; Fandeli, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Tahap pertama adalah identifikasi eksisting melalui survei lapangan, kemudian dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan SNI 03-1733-2004 untuk menentukan tingkat ketersediaan. Selain itu, digunakan teknik skoring untuk menilai kualitas fisik prasarana dan analisis spasial untuk memetakan sebaran sarana di Kelurahan Mawang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Sarana Pendidikan

Kondisi sarana pendidikan di Kelurahan Mawang menunjukkan struktur pelayanan yang komprehensif, mencakup jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas. Inventarisasi fasilitas pendidikan di wilayah ini terdiri dari dua unit TK/PAUD, dua unit SD/SDIT, dua unit SMP/SMP IT, dan satu unit SMA IT. Keberadaan institusi pendidikan yang berjenjang ini merepresentasikan aksesibilitas pendidikan formal yang memadai bagi masyarakat lokal.

Secara spasial, persebaran sarana pendidikan di Kelurahan Mawang menunjukkan pola linier yang terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan poros utama. Karakteristik khusus ditemukan pada integrasi fasilitas pendidikan berbasis Sekolah Islam Terpadu (SIT), di mana terdapat konsentrasi jenjang SD hingga SMA dalam satu lokasi fungsional. Pola konsentrasi ini mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan lahan melalui sistem zonasi pendidikan terpadu, namun di sisi lain memerlukan manajemen aksesibilitas yang tepat pada jalan poros tersebut untuk mengantisipasi potensi beban pergerakan di masa mendatang.

Tabel 1. Daftar Sekolah di Kelurahan Mawang.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama Sekolah
1	TK/PAUD	2	- TK/PAUD Tiga Bahasa Nailun Nabhan - TK Pusat Paud Teratai Mawang
2	SD	2	- SD Inpres Buttadidia - SDIT Wahdah Islamiyah Gowa
3	SMP	2	- SMP N 5 Sungguminasa - SMPIT Wahdah Islamiyah Gowa
4	SMA	1	- SMAIT Wahdah Islamiyah Gowa

Sumber: Hasil survei lapang dan hasil scrapping data Google Map

Sarana Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan perlu diperhatikan, supaya tercipta kualitas hidup masyarakat yang sehat. Hal tersebut perlu diimbangi dengan disediakannya fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Di

Kelurahan Mawang, fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi posyandu dan apotek sebagai layanan kesehatan dasar. Namun, untuk mengakses layanan kesehatan tingkat pertama yang lebih komprehensif, masyarakat bergantung pada fasilitas Puskesmas di wilayah sekitar. Jarak dari Kelurahan Mawang menuju Puskesmas Bontomarannu adalah sekitar 3,2 km, menuju Puskesmas Samata sekitar 4 km, dan menuju Puskesmas Somba Opu sekitar 5,7 km.

Tabel 2. Daftar Sarana Kesehatan di Kelurahan Mawang.

No	Layanan Kesehatan	Jumlah	Nama
1	Posyandu	1	- Posyandu Melati 2
2	Apotek	2	- Apotek Pattallassang Farma - Apotek Nurul Afifah

Sumber: Hasil survei lapang dan hasil scrapping data Google Map

Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan komponen infrastruktur sosial yang krusial dalam memfasilitasi aktivitas keagamaan sekaligus meningkatkan kualitas spiritualitas masyarakat. Berdasarkan karakteristik sosiokeagamaan di wilayah perencanaan, mayoritas penduduk Kelurahan Mawang memeluk agama Islam. Kondisi tersebut berimplikasi pada dominasi penyediaan jenis fasilitas peribadatan yang berfokus pada masjid sebagai sarana ibadah utama.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 18 unit masjid yang secara fungsional melayani seluruh wilayah Kelurahan Mawang. Secara spasial, sebaran fasilitas tersebut menunjukkan pola distribusi yang merata di setiap klaster lingkungan permukiman. Tingginya kuantitas dan keterjangkauan lokasi masjid ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap sarana peribadatan telah memadai, sehingga dapat mendukung efektivitas kegiatan sosial-keagamaan di tingkat lokal.

Tabel 3. Daftar Sarana Peribadatan di Kelurahan Mawang.

No	Nama Masjid	No	Nama Masjid
1	Masjid Annur	10	Masjid Hj. Majawang Daeng Te'ne
2	Masjid An-Nas Perumahan Danau Alam Pendidikan	11	Masjid Assunnah Almurrahmah Mattoanging
3	Masjid Kubah 99 Asmaul Husna	12	Masjid Malewang
4	Masjid Kelurahan Malewang	13	Masjid Soe Dg Sewang bontoramba
5	Masjid Tanammawang	14	Masjid Al Maghfirah
6	Masjid Prof Syamsu Mappa	15	Masjid Qurrata A'yun Muhammadiyah Samata.
7	Masjid Al-Amran	16	Masjid Al Ashiry
8	Masjid Abu Bakar As-Siddiq	17	Masjid Taufiq bin Haeruddin
9	Masjid Al Qadri	18	Masjid Ar Rafah

Sumber: Hasil survei lapang dan hasil scrapping data Google Map

Sarana Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa merupakan determinan utama penggerak aktivitas ekonomi wilayah yang memerlukan dukungan infrastruktur fungsional yang memadai. Di Kelurahan Mawang, fasilitas ekonomi tersebut diidentifikasi melalui keberadaan unit pertokoan/warung,

jasa kuliner (rumah makan), dan bengkel. Secara spasial, pola persebaran fasilitas ini menunjukkan kecenderungan konsentrasi linier di sepanjang koridor Jalan Poros Malino. Sebagai arteri utama yang melayani pergerakan barang dan manusia, koridor ini membentuk aglomerasi aktivitas perdagangan yang berkembang seiring dengan tingginya intensitas lalu lintas.

Konsentrasi spasial tersebut merefleksikan bahwa perkembangan usaha sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan visibilitas terhadap calon konsumen. Fenomena distribusi yang mengikuti jalur transportasi utama ini mengindikasikan karakteristik kawasan sebagai pusat pelayanan ekonomi berbasis jalan (*ribbon development*), yang secara strategis mampu melayani kebutuhan masyarakat lokal sekaligus menangkap potensi pasar dari pergerakan lintas wilayah.

Tabel 4. Daftar Sarana Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Mawang.

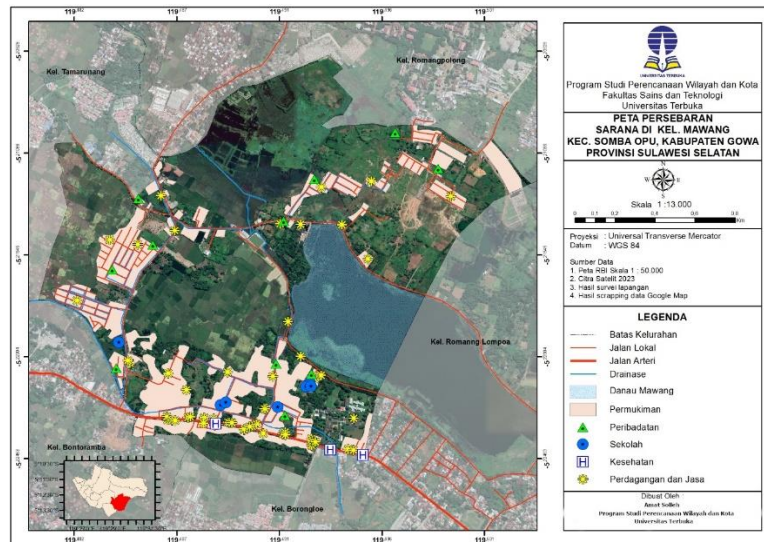
No	Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Jumlah
1	Pertokoan / Warung	9
2	Rumah Makan	45
3	Bengkel	10

Sumber: Hasil survei lapang dan hasil *scraping* data *Google Map*

Sarana Ruang Terbuka Hijau

Kelurahan Mawang memiliki aset ruang terbuka berupa rekreasi alam signifikan yang berpusat pada kawasan Danau Mawang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2011–2030, Danau Mawang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Penetapan ini memberikan legitimasi bahwa danau tersebut merupakan elemen ekologis vital yang berfungsi menjaga daya dukung lingkungan serta menjamin kelestarian ekosistem lokal. Dengan demikian, peran Danau Mawang melampaui fungsi rekreasi konvensional, yakni sebagai instrumen stabilitas ekologis wilayah.

Sejalan dengan fungsi ekologis tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2007 mengenai RPJPD 2005–2025 menempatkan kawasan Danau Mawang sebagai lokus prioritas dalam program pengembangan dan rehabilitasi sektor pariwisata daerah. Integrasi antara kebijakan konservasi dan pengembangan sektor tersier ini menegaskan nilai strategis Danau Mawang sebagai aset pariwisata berbasis lingkungan (*nature-based tourism*). Optimalisasi kawasan ini melalui manajemen yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), baik terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup maupun terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kelurahan Mawang.



Gambar 1. Peta Persebaran Sarana di Kelurahan Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Mawang didukung oleh keberadaan kantor kelurahan yang berlokasi strategis di jalur utama. Meski demikian, keterbatasan sarana terlihat pada sektor keamanan operasional, di mana wilayah ini masih bergantung pada fasilitas kepolisian tingkat kecamatan. Distribusi pelayanan keamanan terdekat dilayani oleh Polsek Bontomarannu dengan radius 2,4 km dan Polsek Somba Opu dengan jarak tempuh sekitar 4,2 km dari pusat kelurahan.

Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan elemen fundamental sistem transportasi darat yang mengintegrasikan berbagai zona dalam suatu wilayah. Mengacu pada hierarki jalan nasional, konektivitas di Kelurahan Mawang bertumpu pada keberadaan jalan kolektor dan jalan lokal. Segmen jalan kolektor di wilayah ini mengemban fungsi distribusi untuk menghubungkan Kelurahan Mawang dengan simpul-simpul ekonomi regional di luar batas administrasi. Sementara itu, jalan lokal berperan dalam skala mikro sebagai penyedia akses langsung bagi pergerakan domestik penduduk, yang mengintegrasikan area hunian dengan fasilitas publik setempat.

Analisis Aspek Sarana dan Parasarana

Sarana Pendidikan

a. Analisis Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kelurahan Mawang

Level of Service (LoS) merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduknya. Penilaian ini berpedoman pada standar SNI 03-1733-2004. Jika nilai LoS

mencapai lebih dari 100%, berarti wilayah tersebut telah memiliki fasilitas yang memadai atau bahkan berlebih dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Sebaliknya, apabila nilai LoS berada di bawah 100%, maka wilayah tersebut dinilai belum memenuhi standar pelayanan yang diperlukan dan membutuhkan peningkatan fasilitas. Dengan demikian, LoS menjadi acuan penting dalam menilai kelayakan dan efisiensi penyediaan pelayanan publik di suatu Kawasan.

Standar jumlah penduduk pendukung menurut SNI 03/1733/2004 pada tiap sarana pendidikan yaitu:

Jumlah penduduk pendukung TK : 1.250 jiwa
 Jumlah penduduk pendukung SD : 1.600 jiwa
 Jumlah penduduk pendukung SMP : 4.800 jiwa
 Jumlah penduduk pendukung SMA : 4.800 jiwa

Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Mawang sebanyak 5.563 jiwa (BPS, 2025)

Rumus dari *Level of Service* yaitu:

$LoS = 1 / (\text{jumlah penduduk} / \text{jumlah sarana} / \text{jumlah penduduk pendukung SNI sarana})$.

Tabel 5. Perhitungan *LoS* Sarana Pendidikan.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sarana (eksisting)	Jumlah Penduduk Pendukung (SNI)	<i>LoS</i>	Standar Ketersediaan Fasilitas
1	TK/PAUD	2	1.250	44,9 %	5
2	SD Sederajat	2	1.600	57,5 %	4
3	SMP Sederajat	2	4.800	172,6 %	2
4	SMA Sederajat	1	4.800	86,3 %	2

Sumber: Hasil analisis, 2025

b. Analisis Keterjangkauan Sarana Pendidikan di Kelurahan Mawang

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 standar radius pencapaian untuk sarana Pendidikan sebagai berikut:

Radius capaian sarana TK : 500 m
 Radius capaian sarana SD : 1.000 m
 Radius capaian sarana SMP : 1.000 m
 Radius capaian sarana SMA : 3.000 m

Berdasarkan standar radius pelayanan SNI 03-1733-2004, keterjangkauan sarana pendidikan dasar dan menengah di Kelurahan Mawang dikategorikan memadai dengan cakupan radius masing-masing 1.000 meter (SD dan SMP) serta 3.000 meter (SMA). Namun, temuan penelitian mengidentifikasi adanya kesenjangan pada jenjang TK, di mana radius pelayanan 500 meter belum mampu menjangkau seluruh area permukiman secara menyeluruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pendidikan

tingkat lanjut telah tersedia dengan baik, optimalisasi persebaran sarana PAUD masih diperlukan untuk menjamin efektivitas layanan pendidikan di tingkat lokal.

Sarana Kesehatan

a. Analisis Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Mawang

Analisis yang digunakan adalah *Level of Services* (LoS) dengan Standar jumlah penduduk pendukung menurut SNI 03/1733/2004 pada tiap sarana kesehatan yaitu:

Jumlah penduduk pendukung Posyandu: 1.250 jiwa

Jumlah penduduk pendukung Apotek : 30.000 jiwa

Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Mawang sebanyak 5.563 jiwa (BPS, 2025)

Tabel 6. Perhitungan *LoS* Sarana Kesehatan.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana (eksisting)	Jumlah Penduduk Pendukung (SNI)	LoS	Standar Ketersediaan Fasilitas
1	Posyandu	2	1.250	22,5 %	5
2	Apotek	1	30.000	1078,6 %	1

Sumber: Hasil analisis, 2025

Analisis ketersediaan sarana kesehatan di Kelurahan Mawang mengungkapkan adanya keterbatasan pada fasilitas kesehatan dasar, yang saat ini hanya mencakup posyandu dan apotek. Berdasarkan perhitungan *Level of Service* (LoS) merujuk pada SNI 03-1733-2004, nilai LoS posyandu tercatat hanya sebesar 22,5%, yang mengindikasikan ketidakcukupan jumlah fasilitas untuk melayani 5.563 jiwa penduduk. Kontras dengan hal tersebut, sarana apotek memiliki nilai LoS mencapai 1.078,6%, sehingga dikategorikan sangat memadai. Mengacu pada standar teknis, Kelurahan Mawang memerlukan penambahan Balai Pengobatan Warga atau Tempat Praktik Dokter guna memenuhi ambang batas jumlah penduduk pendukung dan mencapai pelayanan kesehatan yang optimal.

b. Analisis Keterjangkauan Sarana Kesehatan di Kelurahan Mawang

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 standar radius pencapaian untuk sarana kesehatan sebagai berikut:

Radius capaian sarana Posyandu : 500 m

Radius capaian sarana Apotek : 1.500 m

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa wilayah permukiman yang berada di sekitar pusat kelurahan umumnya telah terjangkau oleh apotek, namun layanan posyandu dengan jangkauan yang lebih terbatas tidak sepenuhnya mencakup seluruh kawasan permukiman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di area permukiman yang lebih tersebar atau berada di tepi kelurahan, masih

menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, peningkatan distribusi posyandu atau penyediaan titik layanan tambahan menjadi penting untuk memastikan pemerataan akses kesehatan, sekaligus mendukung kualitas pelayanan publik dan ketahanan sosial masyarakat di Kelurahan Mawang.

Sarana Peribadatan

a. Analisis Ketersediaan Sarana Peribadatan di Kelurahan Mawang

Analisis yang digunakan adalah *Level of Services* (LoS) dengan Standar jumlah penduduk pendukung menurut SNI 03-1733-2004 pada tiap sarana peribadatan yaitu: Jumlah penduduk pendukung sarana masjid : 2.500 jiwa. Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Mawang sebanyak 5.563 jiwa (BPS, 2025)

Tabel 7. Perhitungan *LoS* Sarana Peribadatan.

No	Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana (eksisting)	Jumlah Penduduk Pendukung (SNI)	LoS	Standar Ketersediaan Fasilitas
1	Masjid	18	2.500	808,9 %	3

Sumber: Hasil analisis, 2025

Analisis ketersediaan sarana peribadatan di Kelurahan Mawang menunjukkan bahwa fasilitas ibadah telah melampaui kebutuhan masyarakat secara signifikan. Dominasi penduduk Muslim didukung oleh keberadaan 18 unit masjid yang tersebar merata, sehingga menjamin aksesibilitas pelayanan keagamaan yang tinggi. Berdasarkan perhitungan *Level of Service* (LoS) merujuk pada SNI 03-1733-2004, sarana masjid memiliki nilai LoS sebesar 808,9%. Angka ini jauh melebihi standar teknis sebesar 2.500 jiwa per unit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.563 jiwa, kapasitas sarana peribadatan di Kelurahan Mawang dikategorikan sangat memadai (surplus), yang sekaligus mencerminkan keselarasan antara penyediaan fasilitas dengan karakteristik demografis wilayah setempat.

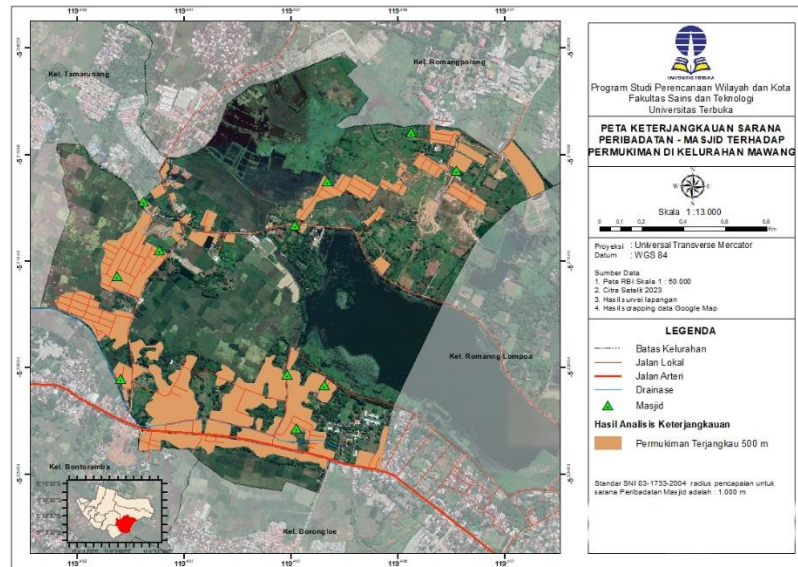
b. Analisis Keterjangkauan Sarana Peribadatan di Kelurahan Mawang

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 standar radius pencapaian untuk sarana peribadatan sebagai berikut:

Radius capaian sarana masjid : 1.000 m

Analisis keterjangkauan sarana peribadatan di Kelurahan Mawang menunjukkan bahwa mayoritas kawasan permukiman telah tercakup dalam radius pelayanan masjid berdasarkan standar SNI 03-1733-2004, yakni sejauh 1.000 meter. Hasil pemetaan spasial mengindikasikan bahwa area permukiman (diidentifikasi dengan zona berwarna oranye) berada dalam jangkauan fasilitas eksisting yang

terdistribusi secara merata. Meskipun jangkauan pelayanan saat ini dinilai optimal, perencanaan penyediaan sarana keagamaan di masa mendatang tetap memerlukan pertimbangan terhadap dinamika pertumbuhan penduduk dan potensi keberagaman sosio-religius. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dukungan fasilitas terhadap kehidupan sosial-spiritual masyarakat secara komprehensif.



Gambar 2. Peta Keterjangkauan Sarana Peribadatan-Masjid Terhadap Permukiman di Kelurahan Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Sarana Perdagangan dan Jasa

a. Analisis Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Mawang

Ketersediaan fasilitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Mawang yaitu terdiri dari pertokoan/warung, rumah makan dan bengkel. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 macam-macam sarana perdagangan dan jasa tersebut masuk kedalam jenis warung/toko dengan jumlah penduduk pendukung sebanyak 250.

Tabel 8. Perhitungan *LoS* Sarana Perdagangan dan Jasa.

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana (eksisting)	Jumlah Penduduk Pendukung (SNI)	<i>LoS</i>	Standar Ketersediaan Fasilitas
1	Warung/Toko	62	250	287,6 %	23

Sumber: Hasil analisis, 2025

Berdasarkan analisis *Level of Service* (*LoS*), fasilitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Mawang yang mencakup toko/warung, rumah makan, dan bengkel menunjukkan tingkat pelayanan yang signifikan. Dengan ketersediaan 62 unit sarana dibandingkan standar SNI 03-1733-2004 sebesar satu unit per 250 jiwa, nilai *LoS* yang dihasilkan mencapai 287,6%. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan minimal teoritis sebanyak 23 unit untuk populasi yang ada. Kondisi ini mengindikasikan adanya

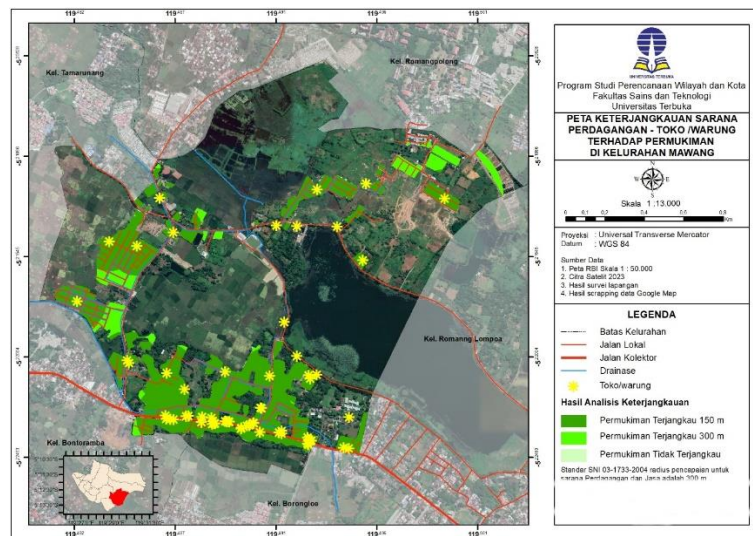
surplus fasilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan kebutuhan harian masyarakat di Kelurahan Mawang telah terakomodasi secara sangat memadai.

b. Analisis Keterjangkauan Sarana Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Mawang

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 standar radius pencapaian untuk sarana Perdagangan dan Jasa sebagai berikut:

Radius capaian sarana warung/toko : 300 m

Analisis aksesibilitas sarana perdagangan (warung/toko) di Kelurahan Mawang menunjukkan bahwa mayoritas kawasan permukiman telah memenuhi radius pelayanan ideal antara 150 hingga 300 meter sesuai standar SNI 03-1733-2004. Distribusi sarana yang linier mengikuti jaringan jalan lokal secara signifikan meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan harian. Meskipun terdapat sebagian kecil area permukiman yang berada di luar jangkauan optimal khususnya pada wilayah yang jauh dari koridor jalan utama secara agregat, tingkat keterjangkauan sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Mawang dikategorikan sangat baik. Hal ini merepresentasikan distribusi spasial yang efektif dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.



Gambar 3. Peta Keterjangkauan Sarana Perdagangan-Toko/Warung Terhadap Permukiman di Kelurahan Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Sarana Ruang Terbuka Hijau

Danau Mawang merupakan aset rekreasi alam di Kelurahan Mawang yang memiliki signifikansi ekologis dan sosial. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2007 tentang RPJPD 2005–2025 menetapkan kawasan ini sebagai prioritas pengembangan dan rehabilitasi sektor pariwisata, kondisi faktual menunjukkan keterbatasan fasilitas pendukung yang cukup signifikan. Hasil observasi lapangan mengidentifikasi

minimnya infrastruktur dasar, seperti aksesibilitas jalan yang belum terkeraskan (jalan tanah), rendahnya sanitasi lingkungan, serta ketiadaan furnitur jalan (*street furniture*) dan sarana keselamatan bagi pengunjung. Fenomena ini mengindikasikan adanya diskrepansi antara kebijakan perencanaan dengan implementasi pengelolaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fasilitas, penataan ruang, dan manajemen lingkungan yang komprehensif guna mendukung keberlanjutan fungsi rekreasi serta konservasi nilai ekologis danau.

Sarana Pemerintahan

Analisis terhadap sarana pemerintahan di Kelurahan Mawang mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan publik pada tingkat lokal masih terbatas. Saat ini, fungsi administratif hanya terpusat pada kantor kelurahan yang berlokasi strategis di koridor jalan utama, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun, dari aspek keamanan, Kelurahan Mawang belum memiliki kantor Kepolisian Sektor (Polsek) secara mandiri. Kebutuhan keamanan warga masih bergantung pada fasilitas di tingkat kecamatan, yakni Polsek Bontomarannu ($\pm 2,4$ km) dan Polsek Somba Opu ($\pm 4,2$ km). Ketergantungan terhadap sarana eksternal ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan keamanan belum optimal, terutama terkait efisiensi waktu respon (*response time*). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan infrastruktur pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih komprehensif di masa depan.

Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kelurahan Mawang mencakup fungsi kolektor dan lokal, dengan Jalan Poros Malino sebagai arteri kolektor utama yang menghubungkan wilayah ini ke pusat pemerintahan Kabupaten Gowa (Sungguminasa) serta kawasan pariwisata Malino. Secara fungsional, ruas jalan ini dinilai memadai karena didukung oleh perkerasan aspal dalam kondisi baik yang menjamin kelancaran mobilitas regional. Namun, ketersediaan prasarana pendukung masih belum memenuhi standar SNI 03-1733-2004, khususnya terkait ketiadaan trotoar. Berdasarkan standar tersebut, jalan dengan lebar perkerasan 6 meter idealnya dilengkapi dengan bahu jalan dan trotoar masing-masing selebar 1,5 meter. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kendaraan (*vehicle-oriented*), sehingga aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada koridor strategis ini masih terabaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Kelurahan Mawang memiliki karakteristik yang variatif antar-sektor. Secara kuantitas, sarana peribadatan serta perdagangan dan jasa menunjukkan kondisi surplus yang signifikan dengan nilai *Level of Service* (LoS) masing-masing sebesar 808,9% dan 287,6%, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan religius dan ekonomi harian masyarakat telah terpenuhi secara optimal. Namun, kondisi kontras ditemukan pada sektor kesehatan dasar dan pendidikan anak usia dini yang masih mengalami defisit fasilitas dengan nilai *LoS* di bawah ambang batas standar SNI 03-1733-2004. Dari aspek spasial, persebaran sarana cenderung mengikuti pola *ribbon development* di sepanjang koridor Jalan Poros Malino, sehingga menciptakan disparitas aksesibilitas bagi penduduk yang bermukim jauh dari jalur utama. Sementara itu, pada aspek prasarana transportasi, meskipun jangkauan jalan telah mencakup hampir seluruh wilayah permukiman, terdapat permasalahan serius pada kualitas pemeliharaan jalan lokal serta ketiadaan fasilitas pejalan kaki di jalan kolektor utama. Terakhir, ditemukan diskrepansi antara regulasi kebijakan dengan realitas lapangan terkait Danau Mawang, di mana statusnya sebagai Kawasan Strategis Kabupaten belum didukung oleh infrastruktur pariwisata yang memadai, sehingga potensi ekowisata di wilayah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengembangan ekowisata di Kelurahan Mawang, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penambahan unit layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan penyediaan sarana pendidikan anak usia dini untuk meminimalisir gap pelayanan pada klaster permukiman yang terisolasi secara radius. Dalam aspek infrastruktur jalan, revitalisasi melalui pemeliharaan rutin pada jalan lokal dan pengadaan trotoar pada jalan poros utama harus segera dilakukan guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta meningkatkan citra kawasan sebagai destinasi wisata.

DAFTAR REFERENSI

- Afriandi, R. (2022). *Analisis spasial pusat pelayanan wilayah*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2025). *Kelurahan Mawang dalam angka 2025*. Gowa: BPS Kabupaten Gowa.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism: Principles and practice*. London: Pearson.

- Dian, R., & Wahyudi, S. (2020). Efektivitas ketersediaan sarana sosial di kawasan permukiman. *Jurnal Tata Kota*, 12(1), 45-56.
- Fandeli, C. (2021). *Perencanaan ekowisata di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunn, C. A., & Var, T. (2020). *Tourism planning: Basics, concepts, cases*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003061656>
- Hariyanto, A. (2019). Strategi penyediaan infrastruktur permukiman berkelanjutan. *Jurnal Infrastruktur*, 5(2), 88-102.
- Irawan, B., et al. (2021). Analisis aksesibilitas fasilitas umum terhadap pusat permukiman. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 23(2), 112-120.
- Kurnia, A., et al. (2019). Analisis ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 10(2), 145-158.
- Marzaman, L. U., et al. (2023). Evaluasi jaringan drainase dan jalan lokal pada kawasan penyangga. *Jurnal Urbanisme*, 15(1), 22-35.
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025. Gowa: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Gowa: Sekretariat Daerah.
- Ramdani, D., & Mulyana, E. (2022). Teori dan praktik standar pelayanan minimal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 201-215.
- Rumagit, G. J., et al. (2021). Evaluasi infrastruktur dasar dan fasilitas umum pada kawasan permukiman. *Jurnal Spasial*, 8(3), 312-325.
- Saputra, H., & Wijaya, K. (2020). Pemodelan level of service fasilitas publik perkotaan. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 9(4), 178-189.
- Sujarto, D. (2018). *Dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tallo, A. J., et al. (2021). Pemetaan spasial sarana prasarana sosial ekonomi tingkat kelurahan. *Jurnal Geografi*, 13(2), 167-178.
- Tamin, O. Z. (2018). *Perencanaan dan permodelan transportasi*. Bandung: ITB Press.
- Tim Redaksi KBBI. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zahra, S., & Prasetyo, B. (2023). Analisis radius pelayanan fasilitas pendidikan dasar menggunakan SIG. *Jurnal Geodesi*, 12(2), 55-64.